

# KIRI ISLAM, JARINGAN INTELEKTUAL DAN PARTAI POLITIK: Sebuah Catatan Awal<sup>1</sup>

Ken MIICHI



Peneliti JSPS (Japan Society for Promotion of Science),  
mahasiswa S3 Kobe University, Graduate School of In-  
ternational Cooperation Studies.

*Politik ada di mana-mana, (intelektual) tidak bisa lari ke bidang-bidang seni dan pemikiran murni, demikian juga, ke bidang-bidang objektif yang bebas kepentingan atau teori transendental.*

Edward W. Said.<sup>2</sup>

Artikel ini akan memfokuskan pembahasan mengenai aktivis muda Nahdlatul Ulama dan keterlibatan mereka dalam jaringan intelektual kota dan gerakan sosial sejak 1970-an. Nahdlatul Ulama (NU) yang berarti kebangkitan ahli agama (ulama) merupakan organisasi Islam tradisional terbesar di Indonesia.<sup>3</sup> Organisasi ini beranggotakan khususnya ulama yang mengajar dan mengelola pesantren, santri-santri mereka dan anggota masyarakat sekitarnya yang sebagian besar berasal dari pedesaan

<sup>1</sup>Artikel ini berjudul asli "Emergence of "Islamic Left?": The Involvement of Young Nahdlatul Ulama in Indonesian Intellectual Network". Merupakan versi revisi dari makalah yang dipresentasikan pada Lokakarya Internasional "Masyarakat dan Gerakan Rakyat di Dunia Islam" di Universitas Kyoto of Foreign Studies, 25-26 November 2000. Dialihbahasakan oleh M. Imdadun Rahmat.

<sup>2</sup>Edward W. Said, *Representations of The Intellectual*, (t.p.: Vintage Books, 1996), hlm. 21.

<sup>3</sup>NU adalah "tradisional" dalam rasa agama dan budaya. Di sini, penulis secara sederhana memberikan definisi agama yang sangat sempit bagi Islam Tradisionalis. Islam Tradisionalis menganut salah satu dari empat mazhab dan pemaknaan mereka atas al-Qur'an dan Hadits tergantung kepada fiqih. Islam Modernis menolak *taqlid* dan mencari "modernitas" melalui merujuk secara langsung kepada al-Qur'an dan Hadits dengan penafsiran yang "rasional" (*ijtihad*). Lihat beberapa diskusi tentang tradisi NU. Martin van Bruinessen, "Tradition for the Future: The Reconstruction of Traditionalist Discourse within NU", Greg Barton and Greg Fealy (eds.), *Nahdlatul Ulama, Traditional Islam and Modernity in Indonesia*, (Clayton: Monash Asia Institute, 1996), hlm. 163-189.

Jawa. NU mengklaim memiliki anggota lebih dari 30 juta di seluruh Indonesia.

Pada 1970-an terdapat karya-karya antropologis mengenai NU yang menjelaskan pesantren dan komunitasnya.<sup>4</sup> Baru-baru ini, terdapat berbagai penelitian yang menjelaskan NU sebagai pelaku politik dalam konteks politik nasional.<sup>5</sup> Artikel ini mengenyampingkan dulu dua hal di atas. Penulis akan memusatkan perhatian pada sejumlah kecil individu dan organisasi-organisasi kecil yang berkaitan dengan NU, —bukan organisasi NU secara keseluruhan— dan mencoba menempatkan mereka dalam konteks jaringan intelektual yang lebih luas dan berbagai gerakan sosial.<sup>6</sup> Ini penulis lakukan karena, orang memahami NU sebagai: *Pertama*, NU bukan organisasi modern yang birokratik dalam pengertian Max Weber, tetapi lebih

tepat sebagai sebuah jaringan ulama dan pesantren mereka. *Kedua*, berbagai perubahan NU mengenai peranannya dalam politik nasional dan ranah kemasyarakatan selalu dipelopori oleh sejumlah kecil pemimpin secara individual. Sebagai misal, NU sebagai organisasi memiliki partai politik pada tahun 1970-an, tetapi kemudian bergeser ke kegiatan-kegiatan sosial pada pertengahan 1980-an. Intelektual kota dan “anak muda NU” non-ulama memainkan peran penting dalam pergeseran ini. “Kaum Intelektual aktif” ini diatur secara organik dan berbeda dari ulama tradisional.<sup>7</sup> NU merubah kebijakan formalnya setelah aksi-aksi individual oleh mereka sendiri atau dengan membentuk kelompok-kelompok kecil yang independen. Di antara organisasi-organisasi di Indonesia yang berhubungan dengan NU atau

---

<sup>4</sup>Sebagai contoh, Clifford Geertz, “The Javanese Kiyayi: the Changing Role of a Cultural Broker”, *Comparative Studies in Society and History*, 2, hal. 222-249. Clifford Geertz, *The Religion of Java*, (New York: The Free Press, 1960). Hiroko Hirokoshi, *A Traditional Leader in a Time of Change: The Kiyayi and Ulama of West Java*, disertasi Ph.D, University of Illinois at Urbana Champaign, 1976. (Diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia oleh Umar Basalim dan Muntaha Azhari, *Kyai dan Perubahan Sosial*, (Jakarta: P3M, 1987).

<sup>5</sup>Contoh yang khusus antara lain; Andree Feillard, *NU vis-à-vis Negara*, (Yogyakarta: LKiS, 1999). (Versi aslinya diterbitkan di Perancis pada 1995). Greg Fealy, *Ulama and Politics in Indonesia: A History of Nabdlatul Ulama, 1952-1967*, disertasi Ph.D, Monash University, 1998.

<sup>6</sup>Beberapa artikel di buku tentang NU di bawah ini berpusat pada berbagai pemikiran individu. Greg Barton & Greg Fealy (eds.), *Nabdlatul Ulama, Traditional Islam and Modernity in Indonesia*, (Clayton: Monash Asia Institute, 1996).

<sup>7</sup>Penulis menggabungkan “intelektual aktif” anak muda NU ke dalam “intelektual organik” dan ulama ke dalam “intelektual tradisional” meminjam dikotomi Gramsci. Menurut Gramsci intelektual tradisional meliputi *tokoh agama, pengacara, notaris, guru, dokter dan sebagainya. Tipe intelektual ini membawa ke arah persentuban massa petani dengan administrasi lokal dan negara (pengacara, notaris, dan sebagainya). Karena aktivitas ini, mereka memiliki fungsi sosial-politik yang penting, semenjak “perantara” profesional sulit dipisahkan dari politik.* Kaum intelektual “organik” dilahirkan oleh modernisasi ekonomi dan urbanisasi. *Setiap kelompok masyarakat mewarisi eksistensi dalam daerah asli fungsi utama dalam dunia produksi ekonomi, membentuk bersama dirinya sendiri, secara organik, satu tingkatan atau lebih para intelektual yang memberikan homogenitas dan*

bahkan dengan Islam, berbagai Ornop (Organisasi Non Pemerintah) —yang secara formal tidak memiliki hubungan dengan NU tetapi secara emosional terlibat— sangat aktif dalam bidang sosial dan intelektual. Meskipun artikel ini berharap memberikan andil dalam kajian tentang NU, tetapi ia memiliki tujuan yang lebih luas. Artikel ini akan mendiskusikan bagaimana para aktivis muda Muslim dari desa —atau mereka yang berdiri di antara ruang intelektual kota dan komunitas desa tradisional— membentuk pemikiran mereka dan mengatur aktivitas mereka dalam perubahan cepat Indonesia modern.

Pada 1960-an, sejumlah kecil anak muda NU kota non-ulama telah muncul sebagai figur-figur pelopor gerakan mahasiswa anti-Sukarno dan anti-Komunis. Pada paroh terakhir 1990-an, terdapat banyak aktivis Ornop jaringan NU yang memiliki buku-buku Kiri dan Post-Strukturalis, dan di sisi lain berkenalan dengan berbagai macam gerakan sosial. Tetapi apa yang lebih menjadi penelitian di sini adalah apa dan siapa yang membuat mereka berubah. Pemikiran Kiri adalah salah satunya. Kiri di Indonesia secara politik berada di pinggiran tetapi sebagai rangkaian pemikiran, ia senantiasa memiliki pengaruh yang

penting. Kiri tidak hanya menawarkan kepada mereka pandangan hidup dan berbagai gagasan yang beragam-ragam seperti; analisa berbasis kelas, kesadaran palsu (*false-consciousness*), perang posisi (*war of position*) dan sebagainya, tetapi juga keahlian untuk memprakarsai kegiatan seperti; bagaimana mengatur gerakan, bagaimana mengekspresikan diri mereka sendiri ke arah yang lebih bermakna, dan sebagainya. Sebagaimana dipaparkan nanti, penulis tidak hanya mencakup Sosialisme dan Komunisme sebagai pemikiran Kiri tetapi juga bentuk-bentuk beragam pemikiran dan gerakan yang terilhami Marxisme seperti: “Kiri baru”, “gerakan sosial baru”, Post-Marxisme, Post-Strukturalisme dan sebagainya. Dus, penulis mendefinisikan orang Kiri sebagai berikut; orang Kiri adalah seseorang yang mengutip —sebelum mengemukakan— berbagai pemikiran Kiri dalam rangka menjelaskan dan mensyahkan pemikiran dan tindakannya. Ini merupakan perbedaan yang jelas dengan orang islamist yang hanya mengutip al-Qur’an dan Hadits untuk tujuan yang sama.

Meskipun Kiri —baik Komunis maupun sosialis memiliki tradisi yang panjang dan kuat di Indonesia— ia lenyap dari arena politik formal sesudah tuduhan kudeta

---

*kesadaran tentang fungsi dirinya sendiri tidak hanya dalam ekonomi tetapi juga bidang sosial-politik.* Antonio Gramsci, Quito Howare dan Geoffrey Nowell Smith diedit dan diterjemahkan dari *Selections from Prison Notebooks*, (ttp.: Lawrence and wishart, 1971). Gramsci memasukkan secara khusus kaum profesional bisnis sebagai intelektual organik kota. Penulis mendefinisikan secara kasar di sini bahwa intelektual adalah pemimpin bidang akademik, sosial dan politik (tidak selalu, tetapi bisa juga ekonomi), yang mengartikulasikan berbagai gagasan dan kegiatan dalam masyarakat. Penulis sering menyebutkan “kaum intelektual aktif” sejak terdapat kesan umum tentang “intelektual akademik”. Masalah mengenai dua macam kaum intelektual agama sangatlah vital untuk sebagian besar dunia Islam. Lihat Dale F. Eickelman dan James Piscatori, *Muslim Politics*, (ttp.: Princeton University Press, 1996), hlm. 16.

Komunis pada 1965 dan diikuti pembunuhan massal.<sup>8</sup> Bagaimanapun mereka masih bertahan dan akan kembali ke kancah politik nasional cepat atau lambat. “Kiri Islam” yang didiskusikan dalam artikel ini akan menunjukkan jalan bagi kemungkinan muncul kembalinya Kiri di perpolitikan Indonesia. Ini adalah bagian dari upaya terus-menerus untuk mencari “ideologi tandingan” melawan Liberalisme global, Liberalisme Amerika dan Liberalisme pasar. “Fundamentalisme” Islam mungkin merupakan jawaban dari “kelompok Kanan” dan “Kiri Islam” mungkin adalah jawaban dari kalangan “Kiri Tengah”.<sup>9</sup>

Artikel ini akan disusun sebagai berikut. *Pertama*, kelompok mahasiswa dan intelektual yang berbasis Muslim dan sosialis pada 1960-an akan secara singkat dijelaskan sebagai pembukaan. Dalam bagian ini, Muslim Tradisionalis telah muncul sebagai pemimpin intelektual dan mahasiswa untuk pertama kalinya. Subchan ZE, yang memainkan peranan menonjol di antara mereka akan menjadi fokus bahasan. *Kedua*, diskusi akan dipusatkan pada perkembangan para tokoh intelektual dan mahasiswa pada periode awal Orde Baru Soeharto. LP3ES (Lembaga Penelitian, Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial) merupakan aktivitas sangat penting

yang dilakukan oleh mereka. LP3ES melihat pesantren sebagai agen pengembangan masyarakat yang potensial, dan karena itu, di sana terdapat banyak aktivis NU yang muncul dari dalam gerakan sosial ini. *Ketiga*, dua orang muda NU pada tahun



1970-an dan 80-an, Abdurrahman Wahid dan Masdar F. Mas’udi akan pula menjadi fokus bahasan. Pendidikan keluarga dan latar belakang filosofis dari dua tokoh intelektual aktif tersebut akan didiskusikan sebagai “model” meskipun bukan contoh yang khas dari pergeseran tradisional Muslim di Indonesia. Bagaimana mereka bersentuhan dengan

pemikiran dan gagasan non-NU dan bagaimana dampaknya terhadap umat asli mereka akan menjadi bahasan. *Keempat*, penulis akan memusatkan pembahasan pada kelompok intelektual aktif di Yogyakarta yang memulai aktivitas intelektual dan sosial dan membentuk jaringan luas pada akhir 1990-an. *Terakhir*, penulis akan menyimpulkan bagaimana kalangan intelektual aktif anak muda NU membentuk pemikiran dan aktivitas mereka termasuk menghadapi Islam non-tradisional, Barat dan ide-ide Kiri pada beberapa dekade yang lalu dan akan secara singkat menganalisis permasalahan mereka pada masa era pasca Soeharto sekarang ini.

<sup>8</sup>Partai Komunis pertama di Asia, PKI di bentuk di Hindia Belanda tahun 1920.

<sup>9</sup>Dalam hal ini, sangat menarik bahwa Partai Amanat Nasional (PAN) yang berbasis Muhamadiyah dan partai Islam lainnya membentuk aliansi “Poros Tengah” di DPR.

### Jaringan Intelektual Aktif di Kalangan Muslim dan Sosialis sejak 1960-an.

Ada dua partai politik Kiri, Partai Sosialis Indonesia (PSI) dan Partai Komunis Indonesia (PKI) yang hidup pada masa Soekarno. Basis massa PKI sebagian besar bertentangan dengan orang taat agama, dan partai yang berbasis Islam kecuali pada periode awal perjuangan kemerdekaan melawan Belanda. Soekarno telah mencoba untuk mengimbangkan hubungan yang tidak harmonis antara orang-orang Komunis, kalangan Islam taat, dan orang-orang nasionalis dengan memunculkan rejim NASAKOM yang berdasarkan nasionalisme, agama dan Komunis. NASAKOM mengalami kegagalan yang menghasilkan pembunuhan mengerikan terhadap orang-orang Komunis pada periode 1965-1966.

Bagaimanapun, PSI menjaga hubungan yang sangat baik dengan partai Masyumi yang berbasis Muslim modernis. Banyak politisi Masyumi dan PSI berasal dari latar belakang suku dan pendidikan yang sama. Mereka adalah kalangan yang lumayan terpelajar di lembaga-lembaga pendidikan Barat dan banyak di antara mereka pernah

belajar di berbagai universitas di Belanda. Mohammad Natsir, seorang mantan ketua partai Masyumi dan salah seorang perdana menteri, dibesarkan dalam lingkungan pendidikan modern dari sekolah dasar. PSI adalah partai intelektual dengan figur utama alumnus pendidikan Belanda, Sutan Syahrir.<sup>10</sup> Mohammad Hatta, wakil presiden pertama Indonesia juga dibesarkan dalam pendidikan tinggi Belanda. Dia diangkat untuk menyusun lembaga-lembaga kegotong-royongan (*cooperative*) dan sosialistik yang dianggap bisa ditiru di Indonesia. PSI dan Masyumi berisi kaum intelektual yang pro demokrasi parlementer dan sangat kritis melawan “Demokrasi Terpimpin”nya Soekarno. Mereka beroposisi kepada NASAKOM dan mendukung Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia (PRRI) pada 1957-1958. Setelah itu Masyumi dan PSI dilarang dan tidak muncul lagi selama masa Orde Baru Soeharto. Kekuatan politik Muslim modernis dan sosialis dalam kancah politik formal nasional sangat dibatasi tetapi mereka tetap memiliki pengaruh informal dan intelektual yang berarti hingga sekarang.<sup>11</sup>

Lingkaran intelektual kota yang meliputi

<sup>10</sup>Lihat lebih lanjut Syahrir dan kaum intelektual PSI dalam J. D. Legge, *Intellectuals and Nationalism in Indonesia: A Study of the Following Recruited by Sutan Syahrir in Occupation Jakarta*, (tpt.: Cornell Modern Project Publications, 1988). Generasi awal PKI juga memiliki keistimewaan intelektual tetapi kemudian dihabisi. Benedict Anderson, “Radicalism After Communism,” dalam *The Spectre of Comparisons: Nationalism, Southeast Asia and the World*, (London and New York: Verso, 2000), (edisi paperback), hal. 286.

<sup>11</sup>Bresnan meringkas dengan baik silsilah kaum intelektual rasionalis-administratif dari Hatta hingga kaum teknokrat Orde Baru. John Bresnan, *Managing Indonesia: The Modern Political Economy*, (New York: Colombia University Press, 1993), bagian 3.

Masyumi-PSI memainkan peran yang sangat signifikan dalam mengakhiri Orde Lama Soekarno dan mengantar Orde Baru Soeharto. Subhan ZE (1930-1973), tokoh muda NU legendaris, muncul dari dalam kancah kekacauan politik ini.<sup>12</sup> Subhan ZE dilahirkan di Kudus, Jawa Tengah. Dia bukanlah anak kiai tetapi keluarganya adalah tradisional yang saleh. Dia belajar di pesantren dan sekolah sekuler lalu pergi ke Amerika dan mendapatkan gelar diploma dalam ilmu ekonomi dari Universitas California pada 1962. Dia adalah pengusaha sukses dan sangat terkenal di kalangan mapan Jakarta. Di organisasi NU, Subhan ZE bertanggung jawab dalam urusan-urusan ekonomi dan dia menjadi salah satu Ketua Tanfidziyah NU pada 1967. Dia menjadi figur nasional ketika PKI dituduh melakukan kudeta 30 September 1965. Karena Subhan memiliki jaringan yang luas di antara para petinggi militer dan berbagai organisasi mahasiswa yang lain, para sesepuh NU memberikan mandat kepadanya untuk meneliti fakta-fakta mengenai kudeta dan mengamankan kepentingan-kepentingan NU. Dia mengambil pendirian yang jelas anti Komunis dan membangun Kesatuan Aksi Pengganyangan Gerakan Tigapuluh September (KAP-Gestapu) bersama kelompok-kelompok lain seperti Partai Katolik, dan Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), sebuah organisasi mahasiswa berbasis Masyumi. Dia memiliki hubungan yang

sangat dekat dengan Jenderal Nasoetion yang memimpin gerakan anti Komunis di militer. Subhan segera menjadi salah seorang pemimpin sipil yang sangat penting dalam gerakan mahasiswa generasi 1966 serta dalam kancah politik nasional.

Meskipun mereka sukses dalam menjatuhkan dan mengakhiri rezim Soekarno, mereka merasa kecewa terhadap Orde Baru Soeharto yang segera menunjukkan wajah yang otoritarian. Sebagai pemimpin partai NU, Subhan ZE sering mengkritik pemerintah. Sebagai partai politik NU bertarung dengan sangat baik pada Pemilu pertama di bawah rezim Orde Baru pada 1971 dan menjadi partai oposisi terbesar. Rezim Soeharto –karena menyadari dukungan rakyat yang dimiliki NU— mencoba untuk melemahkannya dengan segala cara. Kemudian sikap Subhan melawan pemerintahan dan gaya hidupnya yang “play boy” tidak diterima oleh banyak ulama konservatif. Tidak jelas apakah ini merupakan intervensi pemerintah atau keputusan ulama senior NU sendiri, tetapi akibatnya, Subhan didesak untuk meletakkan jabatan ketua partai NU. (Kemudian Subhan meninggal dalam kecelakaan mobil yang misterius di Saudi Arabia pada 1973). Subhan menentang “Demokrasi Terpimpin”nya Soekarno dan sangat gigih mendukung demokrasi parlementer yang disuarakan oleh Masyumi-PSI. Sungguhnya, dia sangat dekat dengan mereka. Subhan ZE adalah termasuk pemimpin

<sup>12</sup>Informasi tentang Subhan ZE. di sini berdasarkan pada tulisan berikut; Arief Mudatsir, “Subhan ZE: Buku Menarik yang Belum Selesai”, *Prisma*, 10, 1983, hal. 59-72., Martin van Bruinessen, *NU, Tradisi, Relasi-relasi Kuasa, Pencarian Wacana Baru*, (Yogyakarta: LKiS, 1994), hal. 90-94.

NU non-ulama pertama kali yang terlibat sangat dalam di kalangan intelektual dan aktivis kota.

Pada 1973, NU dan semua partai politik Islam yang lain “disederhanakan” ke dalam Partai Persatuan Pembangunan. Sama seperti pengalaman NU, semua kelompok politik oposisi diintervensi oleh rezim. Kemudian, banyak mantan aktivis mahasiswa generasi 1966 benar-benar berubah menjadi birokrat-birokrat dan politisi-politisi Golkar yang mendukung pemerintah. Sehingga, mereka yang ingin mempertahankan posisi oposisional relatif melawan negara memerlukan taktik yang hati-hati. Mereka harus menghindari politik praktis dan kritisisme langsung melawan rezim. Mereka mengorganisir kelompok kajian kecil, Organisasi Non Pemerintah (ORNOP), dan bekerja sebagai profesional di bidang kewartawanan, kesejahteraan sosial, hukum dan sebagainya. Beberapa organisasi-organisasi sosial, Lembaga Bantuan Hukum merupakan contoh khas taktik alternatif, meski tidak langsung.

#### **ORNOP dan Transformasi Sosial**

Kemunculan dan perkembangbiakan berbagai Ornop merupakan fenomena

baru pada tahun 1970-an. Gerakan ini satu arah dengan gerakan Kiri aktif di Eropa dan di bagian dunia yang lain. Untuk kasus Indonesia tren ini lebih lanjut meningkat sejak organisasi mahasiswa, partai-partai politik dan bentuk-bentuk konvensional gerakan sosial seperti perhimpunan-perhimpunan buruh dan petani, secara ketat diatur oleh pemerintah. LP3ES menjadi satu di antara berbagai gerakan intelektual terorganisir yang penting pada tahun 1970-an dan 1980-an di Indonesia.<sup>13</sup> LP3ES didirikan khususnya oleh kaum intelektual Muslim Modernis eks-Masyumi dan kaum intelektual sosialis eks-PSI pada 1971. Banyak di antara mereka juga anggota aktivis mahasiswa generasi 1966. LP3ES bisa memanfaatkan patronase dengan para teknokrat eks-PSI seperti Dr. Emil Salim, kepala deputy Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) yang kemudian menjadi Menteri Lingkungan Hidup. LP3ES melaksanakan berbagai jenis penelitian tentang isu sosial dan mempublikasikan sebuah majalah ilmiah yang sangat berpengaruh “Prisma”.<sup>14</sup>

Meskipun LP3ES menganut “tradisi” Masyumi-PSI yang mendukung demokrasi parlementer model Barat ia juga menghargai nilai-nilai luhur pada tradisi-tradisi

<sup>13</sup>Penjelasan tentang LP3ES berikutnya bersumber dari Philip Eldridge, *Non-Government Organization and Democratic Participation in Indonesia*, (Kuala Lumpur: Oxford U.P., 1995), hal. 86-98 dan wawancara dengan Masdar F. Mas’udi. (12 Oktober 1998, 16 Juni 2000), Masykur Maskub (alumnus peserta pelatihan “Tenaga Pengembangan Masyarakat dari Pondok Pesantren” (LTPMDPP) LP3ES, sekarang bekerja sebagai Direktur LAKPESDAM NU) (8 Oktober 1998) dan Muhammad Hisyam (peneliti LIPI, pernah terlibat dalam pelaksanaan LTPMDPP LP3ES (15 Oktober 2000)

<sup>14</sup>Adalah sangat jelas bahwa rejim mengizinkan kebebasan terbatas kepada kaum intelektual untuk berkarya di dalam profesional tingkat tinggi dan wilayah akademik. Jadi pemerintah membiarkan LP3ES bekerja relatif bebas tetapi diawasi dengan sangat ketat.



asli dan pedesaan. Dengan memanfaatkan elemen-elemen asli, ia mencoba menawarkan jalan alternatif dan berbasis akar rumput tentang pembangunan sosial-ekonomi di Indonesia. Para intelektual LP3ES memelopori “transformasi sosial” yang melawan “pembangunanisme” negara meskipun tidak secara langsung dan menuntut berbagai modifikasi. Di LP3ES dan di Ornop-ornop besar lainnya pada tahun 1970-an terdapat pengaruh-pengaruh luar negeri yang sangat jelas. Ide tentang “transformasi sosial” mendasarkan diri kepada teori-teori ketergantungan dan pembebasan yang dikembangkan di Amerika Selatan.<sup>15</sup> Lembaga Studi Pembangunan (LSP) lebih langsung menyatakan sikap anti pembangunanisme ini. Adi Sasono dari LSP selanjutnya cenderung kepada “Sosialisme Islam” yang mengeks-

klusi non-Muslim dan memberi inspirasi sentimen-sentimen anti Cina. Sebaliknya, anak-anak muda NU sering mengutip teori-teori pembebasan Katolik dan menjaga hubungan dengan kalangan non-Muslim.

Selain penelitian dan berbagai usulan kebijakan, LP3ES juga melatih intelektual-intelektual aktif kota dan melaksanakan program-program pengembangan masyarakat, yakni mobilisasi partisipasi rakyat melalui jalan alternatif. Aktivis eks-Masyumi yang berbasis HMI, Dawam Raharjo, direktur LP3ES 1980-1986 memiliki akses khusus ke pesantren, sebuah lembaga pendidikan Islam tradisional. Banyak aktivis Muslim Modernis yang semula mencela sistem tradisional pesantren, mencari potensinya sebagai agen pengembangan masyarakat. LP3ES memulai program pelatihan enam bulan spesialis pengembangan masyarakat yang bekerjasama dengan pesantren NU pada 1978. Di sini, kesempatan terbuka bagi anak muda NU untuk bergabung dengan berbagai aktivitas Ornop. Intelektual non-Islam dan sosialis juga terlibat dalam program pelatihan ini. Dari program LP3ES dan pertukaran pengalaman di dalam pelatihan ini banyak intelektual aktif merintis jaringan lepas organik dan kosmopolitan.

#### **Keterlibatan Anak Muda NU dalam Gerakan Sosial**

Dalam bagian ini penulis akan berkon-

<sup>15</sup>Mansour Fakih, *Masyarakat Sipil untuk Transformasi Sosial; Pergolakan Ideologi LSM Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), hal. 103.



sentralisasi kepada dua orang intelektual aktif yang memimpin anak muda NU untuk menceburkan diri ke dalam dunia Ornop dan gerakan sosial lain. Abdurrahman Wahid (l. 1940) lahir —sebagai cucu Hasyim Asy’ari (1871-1947) salah seorang tokoh pendiri NU dan anak Wahid Hasyim (1913-1953) mantan ketua Tanfidziyah NU dan juga mantan menteri agama— di Jombang Jawa Timur.<sup>16</sup> Setelah menamatkan sekolah SMP dan SMA di Jakarta dan Yogyakarta dia belajar kepada Ali Maksum (1915-1989)<sup>17</sup> di pesantren Krapyak Yogyakarta. Dia pernah belajar ke Universitas Al-Azar di Kairo tetapi “karena dia tidak puas” dia pindah ke Universitas Baghdad dan menggeluti berbagai kurikulum Barat. Dia lulusan bahasa Arab tetapi dia menulis banyak buku tentang masyarakat Barat dan filsafat politik dan membawanya kembali ke Indonesia. Setelah kembali ke Indonesia ia sebentar mengajar di pesantren di Jombang tetapi tidak lama dia pindah ke Jakarta dan aktif di banyak area. Dia sering menulis kolom untuk harian Kompas, Minggu Tempo, majalah Prisma terbitan LP3ES dan sebagainya. Dia juga menjadi pemimpin editor “Wawasan” terbitan LSP, sebuah publikasi yang mencari jalan alternatif pembangunan.<sup>18</sup> Dia bekerja di LP3ES dan Ornop yang lain dan terlibat di dalam

jaringan luas kalangan intelektual aktif. Pada tahun 1980-an ia mulai bekerja di PBNU. Dia dipilih sebagai ketua Tanfidziyah NU bersama ketua Syuriah Ahmad Siddiq (1926-1991) di Muktamar NU Situbondo pada 1984. Di dalam muktamar ini NU memutuskan “kembali ke Khittah 1926”. Menurut Khittah (acuan perjuangan) NU mendefinisikan dirinya sebagai organisasi sosial dan keagamaan (non-politik) dan menegaskan peranannya di dalam rangka memperkuat kondisi sosial-ekonomi rakyat Indonesia. Khittah sebenarnya di usulkan oleh Ahmad Siddiq, ulama senior yang sangat dihormati pada 1979 untuk dimasukkan ke dalam gagasan “transformasi sosial”nya Abdurrahman Wahid dan aktivis muda NU lainnya. Dalam rangka mempersiapkan Khittah Abdurrahman Wahid membentuk “Majlis 24”, sebuah komite yang terdiri 24 orang intelektual aktif termasuk mantan aktivis mahasiswa Zamroni (l. 1935) dan Masdar F. Masudi (l. 1954). Penting dicatat di sini bahwa ulama tradisional Ahmad Siddiq juga memainkan peran yang substansial dalam hal menginisiasi adopsi Khittah dan melindungi Abdurrahman Wahid ketika dia dikritik karena “keanehan” perilakunya.

Sangat sulit untuk mengatakan apa yang mempengaruhi pemikiran dan tindakan Abdurrahman Wahid. Dia membaca

---

<sup>16</sup>Profil Abdurrahman Wahid berikut ini bersumber dari Greg Barton, “The Liberal, Progressive Roots of Abdurrahman Wahid’s Thought,” Greg Barton and Greg Fealy (eds.), *Op. Cit.*, dan wawancara penulis dengan Abdurrahman Wahid di rumahnya di Jakarta 13 Oktober 1998.

<sup>17</sup>Ali Ma’shum adalah ulama yang sangat dihormati. Karena dia tidak banyak mempunyai ambisi-ambisi politik, dia dipilih sebagai ketua Syuriah NU (Rais Aam) 1982-1984 sebagai hasil kompromi antara berbagai faksi. Lihat lebih detail Martin van Bruinessen, *Op. Cit.*, hal. 287.

banyak sekali buku dalam berbagai bidang yang berbeda, dan membentuk gagasannya sesuai konteks Indonesia. Bagaimanapun tetap mungkin menyebutkan di sini beberapa di antaranya yang dia kutip di dalam tulisan-tulisannya dan yang juga dijadikan referensi oleh generasi-generasi sesudahnya. Ide tentang “transformasi sosial” sebagai contoh, dilandasi oleh Abdurrahman Wahid dengan “Teori Pembebasan Katolik” sebagai implikasi bahwa agama ini merupakan pelopor transformasi sosial. Dalam khazanah Islam sendiri ia mengikuti jejak Revolusi Iran Khomainsi, dan “Kiri Islam” Hasan Hanafi Mesir.<sup>19</sup> Pada saat itu, sangat tidak lazim bagi pemimpin Islam Sunni untuk memuji gagasan-gagasan Kristen maupun Islam Syiah. Ia seringkali dikritik ulama NU karena keanehannya tetapi banyak generasi berikutnya yang setuju dengan sikapnya. Said Agil Siraj (l. 1953) sekarang menjabat wakil ketua Syuriah NU sering merujuk teologi Syiah dalam diskusi-diskusi agama. Ada beberapa intelektual aktif muda NU belajar di sekolah-sekolah Kristen dalam rangka memanfaatkan gagasan-gagasan Kristen ke dalam perspektif Islam tradi-

sional. Berbagai jenis buku Arab dan Eropa yang dibawa Wahid kembali dari Timur Tengah “dicuri” oleh para pengikutnya yang lebih muda. Karya-karya para penulis seperti Freire, Hanafi, Sartre, Habermas, dan Foucault dikopi, dipinjam dan diterjemahkan di kalangan anak muda NU pada 1980-an dan 1990-an. Mereka mengacu lebih langsung kepada pemikiran-pemikiran Kiri tersebut.

Abdurrahman Wahid tidak memiliki ijazah pendidikan tinggi formal tetapi dia lulus dari sekolah-sekolah sekuler di Indonesia dan memiliki kesempatan untuk memperoleh pengetahuan ilmiah Barat di Baghdad. Dengan bakat yang luar biasa dia memaknai ulang pemikiran-pemikiran asing ke dalam konteks Indonesia. Dia menunjukkan bahwa orang kelahiran pesantren dapat mengambil bagian secara aktif dalam lingkaran intelektual dan Ornop nasional dan internasional. Akibatnya, generasi yang lebih muda di NU kadang-kadang sangat kritis kepada Wahid, khususnya setelah ia menjadi presiden Indonesia tetapi mereka tetap merujuk kepada apa yang dilakukan dan digerakkan Abdurrahman Wahid dalam lingkaran

---

<sup>18</sup>Mitsuo Nakamura, “The Radical Traditionalism of the Nahdlatul Ulama in Indonesia: A Personal Account of the 26th National Congress, June 1979, Semarang”, Greg Barton and Greg Fealy (eds.), *op.cit.*, hal.71.

<sup>19</sup>Sebagai contoh, Abdurrahman Wahid, “Pandangan Islam tentang Marxisme-Leninisme”, dalam *Mengurai Hubungan Agama dan Negara*, (Jakarta: Grassindo, 1999), hal. 135-159 (tulisan aslinya diterbitkan di *Persepsi*, Nomor 1, 1992 dan diterbitkan kembali di majalah berkala internal NU, *Aula*, September 1998) Abdurrahman Wahid, “Islam dan ‘Civil Society’, Pengalaman Indonesia”, *Halqah*, 6, 1998, hal. 22-26.

intelektual aktif kota.

Masdar F. Mas'udi (l. 1954) lahir di Purwokerto Jawa Tengah.<sup>20</sup> Meskipun orang tuanya bukan orang yang sangat terkenal, dia belajar di pesantren prestisius dan besar di Tegal Rejo dan Krapyak dan diperlakukan sebagai anak kesayangan oleh ulama seniornya. Ali Maksum Krapyak (lihat catatan kaki no.17) mengizinkan Masdar untuk membaca buku-buku pribadinya. Masdar yang dilahirkan dan dibesarkan di bawah pendidikan tradisional yang ketat, bertemu pertama kali dengan pemikir-pemikir modernis Islam Timur Tengah seperti Muhammad Abduh, Qasim Amin, Muhammad Iqbal, dan Muhammad Amin melalui buku-buku itu. Ia menjadi ketua organisasi mahasiswa PMII (pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia) cabang Krapyak dan sering bertemu para aktivis untuk mendiskusikan tema-tema agama dan non-agama. Ia belajar di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta dan menerbitkan majalah mahasiswa "Arena", kemudian menjadi wartawan untuk "Ekuin" di Jakarta. Menjadi aktivis mahasiswa dan wartawan merupakan jalur khas ke arah lingkaran intelektual aktif kota bagi banyak anak muda NU. Jalur khas ini merupakan sarana dan tempat mereka mempelajari keahlian dasar untuk menjadi intelektual; bagaimana mengumpulkan informasi, bagaimana menulis secara logis, bagaimana menerbitkan dan menyebarkan berbagai majalah, bagaimana mengatur

organisasi, dan bagaimana bergaul dengan orang lain.

Di Jakarta, Masdar berkenalan dengan lingkaran intelektual aktif di LP3ES. Sebelumnya, pengetahuannya tentang pemikiran-pemikiran Barat terbatas kepada pemikiran sosiologi di kurikulum IAIN, di Jakarta-lah dia "bertemu orang sosialis untuk pertama kali". Dia menjadi staf dan kemudian menjadi direktur P3M (Perhimpunan Pengembangan Pesantren dan Masyarakat). Sebagai organisasi, P3M didirikan pada tahun 1983 untuk melaksanakan program pengembangan masyarakat pesantren LP3ES. Banyak aktivis P3M berafiliasi ke NU. Mereka adalah Intelektual aktif lulusan IAIN yang berkembang sedikit demi sedikit sejak IAIN menerima lulusan pesantren pada awal 1970-an. P3M memperluas aktivitasnya meliputi diskusi-diskusi agama, publikasi, dan gerakan perempuan. P3M menginisiasi diskusi agama (halaqah) tentang isu-isu sosial-politik, penyebaran gagasan-gagasan seperti pengembangan masyarakat, hak asasi manusia dan demokrasi di kalangan ulama NU. Para pendeta Kristen, para profesional non-agama dan para akademisi sering diundang dalam acara halaqah untuk saling bertukar pemikiran dan gagasan. P3M juga menerbitkan majalah "Pesantren" yang di dalamnya ikut ambil bagian para aktivis LSM baik dari Indonesia maupun dari luar negeri, kaum akademisi dan ulama progresif. Masdar sendiri menerbitkan berbagai interpretasi agama yang sangat liberal

<sup>20</sup>Penjelasan berikutnya mengenai Masdar F. Mas'udi berdasarkan wawancara dengan Masdar F. Mas'udi (12 Oktober 1998, 16 Juni 2000), dan catatan pribadi saya mengenai Halaqah P3M di Lampung (4-6 Nopember 1998) dan di Jakarta (1-4 Juni 2000).

tentang demokrasi dan perempuan. P3M menjadi model bagi Ornop kalangan NU yang aktif di dalam bidang sosial-ekonomi maupun wilayah wacana serta menjadi “jembatan” antara kaum intelektual kota dengan ulama pedesaan.

### **Apakah Kiri Islam Lahir dari Anak Muda NU?**

Lembaga Kajian Islam dan Sosial (LKIS) didirikan pada tahun 1989 khususnya oleh mahasiswa dan lulusan IAIN Yogyakarta.<sup>21</sup> LKiS sebagaimana LP3ES di organisir oleh kelompok intelektual aktif (bukan oleh tokoh yang kharismatik), *dus*, di sini bahasan kita berpusat pada organisasi. Penting juga untuk mendiskusikan jaringan luas yang dibuat oleh LKiS.

Menurut bukletnya LKiS mendukung pandangan Islam yang “transformatif dan toleran” dan melihat Islam sebagai “kekuatan progresif dan pembebasan”.<sup>22</sup> Sikap terhadap Islam ini benar-benar terefleksikan dalam pemikiran dan aktivitas para aktivis NU yang lebih tua seperti Wahid dan Masdar. Seperti dua orang itu anggota LKiS berkiprah di PMII dan kewartawanan sebelum memulai mendirikan Ornop. Tidak seperti Masdar yang baru bertemu dengan kalangan sosialis ketika ia tinggal di Jakarta, aktivis LKiS telah memiliki komunikasi yang intensif dengan kalangan intelektual aktif sosialis dan sekuler sebelum mereka mendirikan LKiS.

Aktivis mahasiswa Islam di Yogyakarta telah belajar mengenai model jaringan kosmopolit di ibukota yang di buat oleh generasi-generasi sebelumnya. Mereka sering ketemu dengan aktivis Kristen, sekuler dan sosialis untuk berdiskusi mengenai berbagai tema sosial-politik. Perpustakaan Hatta yang didirikan sebagai penghormatan kepada wakil presiden Indonesia yang sosialis ini merupakan satu dari pusat pertemuan mereka. Mereka juga membaca buku-buku Kiri Barat yang dibawa oleh Abdurrahman Wahid. Kemudian peneliti Belanda Martin van Bruinessen membantu berbagai kegiatan LKiS. Dia bekerja sebagai konsultan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) pada tahun 1986-1990 dan mengajar di IAIN Yogyakarta dari 1991-1993. Ia mendorong mahasiswanya “berfikir secara ilmiah sosial”. Saat itu juga aktivis LKiS memperoleh informasi tentang studi-studi Islam mutakhir di Timur Tengah dan Eropa dari sumber-sumber yang bervariasi dan menerbitkan beberapa buku dalam bahasa Indonesia. Banyak dari akademisi Islam mutakhir di Eropa seperti Muhammad Arkoun yang sangat dipengaruhi oleh post-strukturalisme. Mereka mencurigai dan mengkritik otentisitas Islam secara radikal memakai pola pikir Kiri seperti Michel Foucault. Fakta ini selanjutnya mendorong intelektual LKiS untuk membaca pemikiran-pemikiran Kiri Barat.

<sup>21</sup>Penulis telah melakukan banyak wawancara dengan seluruh anggota LKiS baik secara formal maupun informal sejak 1998 hingga 2000, sebagian besar di kantor mereka di Yogyakarta.

<sup>22</sup>*Institute for Islamic and Social Studies, Lembaga Kajian Islam dan Sosial* (baik dalam bahasa Inggris maupun bahasa Indonesia), tth., hal. 2.

Satu dari banyak buku sensasional yang diterbitkan LKiS adalah “Kiri Islam: Antara Modernisme dan Post-Modernisme”.<sup>23</sup> Buku ini berisi pengantar singkat tentang Hasan Hanafi Mesir dan ringkasan atas karya Hanafi yang terkenal “Apa Arti Kiri Islam?” Menurut anggota LKiS, buku ini membuat “aktivis yang tidak menyukai buku, menjadi senang membaca, dan santri yang tidak suka aktif menjadi aktif”. Analisa atas buku ini akan membantu kita untuk memahami hasil akhir anak muda NU dan apa arti Kiri buat mereka. Penulis mengajukan asumsi

tentang alasan-alasan mengapa banyak mahasiswa dan santri pesantren tertarik oleh buku ini (dari kontak personal penulis dengan mereka selama beberapa tahun yang lampau). *Pertama*, mereka tertarik oleh Kiri Islam Hassan Hanafi karena pemikiran ini menampilkan Islam yang aktif, transformatif, dan kritis. Hassan Hanafi bukan seorang Marxis tetapi ia memilih terma “Kiri” karena terma ini berarti “penolakan dan kritisisme dalam ilmu politik” dan “Kiri di sini adalah pengamanan yang membuat gerakan massa dan gerakan sosial selamat, dan menganjurkan untuk mengakhiri eksploitasi oleh kekuatan

luar dan pembebasan dari tatanan kolonial”.<sup>24</sup> Ini sangat jelas segaris dengan konsep “transformasi sosial” di dalam ke-Ornop-an di Indonesia sejak 1980-an. *Kedua*, judul buku yang “cantik”, “Islam



Kiri” dan “Post-Modernisme” sangat menarik perhatian mahasiswa. Banyak anak muda NU mencari acuan alternatif dalam memahami dunia dan ini sangat menguntungkan publikasi LKiS. Banyak dari mereka lebih berorientasi aktif kepada rakyat dan semakin berhasrat untuk benar-benar menerjuni gerakan rakyat radikal dan Kiri gaya lama.

Jadi, apakah Kiri Islam muncul dari anak muda NU? Ya. Tetapi mereka Kiri dengan

kadar dan pendekatan yang bervariasi. Sebagai contoh, di NU terdapat jumlah signifikan kaum intelektual organik dan aktif. Ada di antara mereka yang secara langsung merujuk kepada perkembangan mutakhir di dalam gerakan dan akademik Kiri Eropa seperti “gerakan sosial baru” dan kajian-kajian kultural (*cultural studies*), serta melibatkan diri dalam “perang wacana”. Banyak juga yang Kiri lebih sebagai perasaan primordial.

Lalu, apa Kiri Islam itu? Di sini penulis mencatat dua ciri khas. *Pertama*, mencurigai dan mengkritik otentisitas Islam (teks suci, sejarah, ulama) dengan memakai pola pikir

<sup>23</sup>Kazuo Shimogaki, M. Imam Aziz dan M. Jadul Maula (penerjemah.), *Kiri Islam, Antara Modernisme dan Postmodernisme: Kajian Kritis atas Pemikiran Hassan Hanafi*, (Yogyakarta: LKiS, 1993).

<sup>24</sup>*Ibid.*, hlm. 88-89.

Kiri Barat kontemporer. *Kedua*, aktif dalam atau kerja sama dengan gerakan sosial dan politik yang sekular (atau Kiri), namun tetap memiliki motivasi religius.<sup>25</sup>

### **Anak Muda NU di Era Kepresidenan Abdurrahman Wahid.**

Akhir rezim Suharto memberikan lingkungan wacana yang lebih bebas, yang membuka jalan menuju demokrasi multi partai di Indonesia. Saat ini bisa mengekspresikan kritik pedas kepada pemerintah tanpa takut pembalasan dari pemerintah. Baik Islam radikal maupun Marxisme bisa diekspresikan secara lebih terbuka. Lebih dari 100 partai politik didirikan dan 48 di antaranya ikut serta dalam pemilihan umum 1999.

Dalam situasi politik semacam ini, *mainstream* NU membentuk Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan Abdurrahman Wahid memberikan dukungan sangat jelas. Anak muda NU intelektual aktif umumnya setuju dengan pendirian partai tetapi menjaga jarak dari partai. LKiS bersama bermacam-macam organisasi di Yogyakarta dan tempat lain, mengorganisasikan jaringan Ornop untuk mengawasi pemilu. P3M meneruskan halqah fiqih siyasah atau pendidikan politik untuk ulama di daerah, mendiskusikan materi-materi politik seperti "Apa itu demokrasi?" menggunakan baik

gagasan Barat maupun Islam. Banyak di kalangan anak muda NU terlibat dalam gerakan Kiri radikal seperti Partai Rakyat Demokratik (PRD) dan Forum Kota (Forkot). Sikap kritis mereka terhadap pemerintah tidak berubah bahkan setelah Abdurrahman Wahid menjadi presiden Indonesia. Mereka percaya penuh terhadap demokrasi yang mereka perjuangkan dan yang juga disebut cita-cita *Civil Society*.<sup>26</sup> Bahkan penulis mengamati bahwa mereka bersikap kritis dan sinis terhadap partai politik dan politik pada umumnya. Sikap sinis terhadap partai politik yang tumbuh di bawah rezim otoriter Soeharto mungkin akan mengganggu pengembangan demokrasi di Indonesia dan peran mereka di dalamnya. Kaum intelektual kota dari desa memiliki tugas untuk mengartikulasikan gagasan dan aktivitas yang terpisah baik kepada masyarakat desa maupun masyarakat kota. Sebagaimana dinyatakan Antonio Gramsci bahwa peran partai politik adalah kunci yang penting.

(partai politik) bertanggung jawab untuk bergabung bersama-sama kaum intelektual organik dari kelompok yang ada — yang dominan — dan kalangan intelektual tradisional. Partai melakukan fungsi ini dalam ketergantungan yang tegas dengan fungsi dasarnya, yang mengelaborasi bagian komponennya sendiri — elemen kelompok sosial...<sup>27</sup>

<sup>25</sup>Penulis akan membahas apa artinya Kiri dan Kiri Islam dalam politik Indonesia lebih mendalam dalam disertasi.

<sup>26</sup>Anak muda NU selalu mencita-citakan "civil society" sebagai ruang publik yang bersifat kesukarelawanan, pengembangan diri, dan otonom dari negara. Lihat AS Hikam, *Demokrasi dan Civil Society*, (Jakarta: LP3ES, 1996), hal.3. Penulis telah membahas hal ini. Lihat Ken Miichi, "Two Streams of Islamic Civil Society Theories in Indonesia," *Journal for International Cooperation Studies* (Kobe University), 8-2, 2000, hlm. 159-179. (dalam bahasa Jepang).

<sup>27</sup>Antonio Gramsci, *Selection from Prison, Op.Cit.*, hlm.15.

Seperti Ahmad Siddiq untuk Abdurrahman Wahid, dan Ali Ma'sum untuk Masdar F. Mas'udi, ulama' tradisional *sepuh* menjadi sangat penting bagi intelektual aktif dalam rangka mengemukakan gagasan-gagasan dan lebih praktis untuk bertahan di organisasi. Organisasi mahasiswa, Ornop dan pesantren juga menyediakan ruang bagi "penggabungan bersama" dua jenis intelektual. Sekarang apakah mereka bisa memanfaatkan partai politik sebagai wilayah baru untuk mengkomunikasikan dan mengartikulasikan aspirasi rakyat atau tidak, tampak krusial bagi apa yang mereka sebut demokratisasi di Indonesia.

#### Catatan Tambahan untuk Anak Muda NU

Ini tidak berarti bahwa penulis setuju dengan partai politik di Indonesia mutakhir dan anak muda NU yang aktif dalam politik sesudah Pemilu 1999. Bagaimanapun, apa yang disebut NU non-politik "jalur kultural" tidak bisa menghindari tanggungjawab atas situasi politik Indonesia dan NU mutakhir. Tidak ada gerakan kultural (non-politik) murni, sebagaimana dikatakan Edward Said. Gerakan politik yang "critics-oriented", atau "demonstration-oriented" yang tidak bisa mengambil tanggungjawab untuk pemerintahan nyata,

dan tidak bisa mengajukan pilihan realistis tidak didukung oleh masyarakat umum dan dalam jangka panjang akan mati seperti Partai Sosialis Jepang. Jika penulis mengambil contoh di Jepang, dua partai kecil oposisi ideologis; Partai Komunis Jepang dan Partai Komei (Partai Pemerintahan Bersih), lebih kuat daripada Partai Sosialis oleh alasan yang sama.<sup>28</sup> Dua partai ini berfungsi dengan baik sebagai partai rakyat yang membantu rakyat dalam hal-hal kecil dan urusan sehari-hari. Memperhatikan hal ini, jika Golkar bertahan di luar Jawa, itu bisa terjadi karena Golkar mengancam rakyat atau rakyat karena kebodohnya memilihnya, tetapi fungsinya lebih dari partai lain "pro-reformasi".<sup>29</sup>

Penulis tidak menganjurkan bahwa NU "jalur kultural" memasuki partai politik yang ada. Sebenarnya, terdapat sangat banyak hal yang bisa dilakukan melalui gerakan sosial "ekstra parlemeter" atau "jalur kultural": mengawasi aktivitas sehari-hari partai politik daerah maupun nasional, kampanye dan loby untuk kebijakan (tidak hanya demonstrasi), mengkritisi "produktivitas" dan "keterpercayaan" parpol dan sebagainya. "Gerakan penggulingan" Korea dan ombudsman di banyak negara Barat merupakan sekedar dua contoh dari banyak negara.<sup>30</sup> ❖

<sup>28</sup>Partai Komei berbasis sekte Budha dan menarik kelas bawah dan menengah di daerah perkotaan. Partai Komunis dan Partai Komei dua-duanya dipahami oleh orang luar sebagai sangat eksklusif dan hirarkis.

<sup>29</sup>Penulis ingin menekankan sekali lagi; rakyat memilih Golkar bukan karena mereka bodoh. Rakyat miskin tidak dibohongi oleh "kesadaran palsu". Lihat James C. Scott, *The Weapon of the Weak*, (ttp.: Yale University Press, 1985).

<sup>30</sup>"Gerakan penggulingan" Korea mengawasi aktivitas politik dan membuat catatan mengenai para politisi yang "harus digulingkan" di pemilu. Ombudsman, bermakna keterwakilan pada mulanya sebagai sistem pengawasan terhadap birokrasi di Swedia pada 1908 dan menyebar ke banyak bidang dan ke banyak negara.